Disdukcapil SDG's

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Penugasan Prioritas Nasional/Global seperti Pencapaian SDG's

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pendaftaran Penduduk **Kegiatan :** Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Sub Kegiatan :** Penataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan **Tujuan :**	- Kabupaten Dharmasraya di huni oleh Komunitas Adat Terpencil yang kemudian dikenal dengan Suku Anak Dalam - SAD mendiami wilayah Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan IX Koto - Berdasarkan informasi LSM Pundi Sumatera yang kemudian di perkuat oleh aktivis peduli ,SAD yang ada di Kabupaten Dharmasraya sejumlah 77 Jiwa (Tahun 2019) - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus berasaskan : 1. Kepentingan Umum; 2. Kepastian Hukum; 3. Kesamaan Hak; 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; 5. Keprofesionalan; 6. Partisipasif 7. Akuntabilitas 8. Persamaan Perlakuan/Tidak	**Akses:** Masih timpangnya Pelayanan responsif gender antara masyarakat umum dengan komunitas Adat Terpencil **Manfaat :** Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pelayanan terhadap kelompok rentan **Partisipasi:** - Belum tersentuhnya pelayanan terhadap Komunitas Adat Terpencil - Belum ada perlakuan khusus terhadap penduduk rentan **Kontrol:** -	- Kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sulitnya Melacak keberadaan SAD, karena pola hidup mereka yang nomaden - Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender	- Sikap SAD sendiri masih sulit menerima kehadiran orang asing diluar kelompok mereka - Koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil dengan stake holder belum optimal	- Terwujudnya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan	1. Sosialisasi tentang Adminduk 2. Melakukan pendataan SAD dengan bantuan Tokoh masyarakat dan LSM	Meningkatnya Jumlah SAD yang terdata dan memiliki dokumen administrasi kependudukan	**Out put** Bertambahnya jumlah SAD yang meiliki Dokumen Kependudukan **Out come** Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender

Dipindai dengan CamScanner

	Diskriminatif 9. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi kelompok rentan							

Pulau Punjung, April 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABDI AMRI, SE
NIP. 19641231 198612 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S.Sos,M.T NIP 19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
TAHUN ANGGARAN : **2021**

PROGRAM	Program Pendaftaran Penduduk		
KODE PROGRAM	**5.03.02**		
KEGIATAN	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
HASIL/OUTPUT	Bertambahnya jumlah SAD yang memiliki Dokumen Kependudukan		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Kabupaten Dharmasraya di huni oleh Komunitas Adat Terpencil yang kemudian dikenal dengan Suku Anak Dalam . - SAD mendiami wilayah Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan IX Koto - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus berasaskan : 1. Kepentingan Umum; 2. Kepastian Hukum; 3. Kesamaan Hak; 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; 5. Keprofesionalan; 6. Partisipatif; dan 7. Akuntabilitas. 8. Persamaan Pelakuan/Tidak diskriminatif 9. Perlakuan Khusus bagi kelompok rentan		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** a) Masih timpangnya Pelayanan responsif gender antara masyarakat umum dengan Komunitas Adat Terpencil Masih belum ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan : **b. Penyebab Internal** a) Kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b) Sulitnya melacak keberadaan SAD karena pola hidup mereka yang nomaden c) Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender **c. Penyebab Eksternal** a) Terwujudnya fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan		
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**	Sosialisasi tentang Pendataan Penduduk Rentan	
		Tujuan	Agara masyarakat memahami tentang pentingnya pendataan dan pelayanan terhadap penduduk rentan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Melakukan Pendataan dengan bantuan tokoh masyarakat dn LSM	
		Tujuan	Terlaksananya pendataan terhadap penduduk rentan
		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	**46.976.000**	
Capaian Program	**Out put** Bertambahnya jumlah SAD yang memiliki Dokumen Kependudukan **Out come** Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender		

Dipindai dengan CamScanner

Pulau Punjung, April 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA

ABDI AMRI, SE
NIP. 19641231 198612 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	KepalaBapppeda	Kepala DinasSosial P3A PPKB
KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Paryanto, S.Sos,M.T NIP 19690609 198902 1 001	Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

Dipindai dengan CamScanner

FORM KAK/ TOR

Program		Pendaftaran Penduduk
Sasaran Program		Cakupan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Dharmasraya
Kegiatan		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan		Pelayanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	Gambaran Umum	Pelayanan Publik harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
	Indikator Kinerja	Bertambahnya jumlah data komunitas adat terpencil
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Bertambah penduduk dilayani melalui kegiatan yang responsive gender
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan 2. Melakukan pendataan melalui bantuan tokoh masyarakat, LSM dan Aktivis
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan tergantung lokasi SAD Berada
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan **Pelayanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan** Penanggung Jawab : Kepala Disdukcapil
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2021
Biaya		Rp. 46.976.000

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABDI AMRI, SE
NIP 19641231 198612 1 002

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021

Urusan	:	
Unit Organisasi	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
Kegiatan	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan		DAK Non Fisik 2021
Lokasi Kegiatan		Kab. Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2021
Kelompok Sasaran		Komunitas Adat Terpencil
Jumlah 2021		Rp. 46.976.000
Jumlah 2022		
Jumlah 2023		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABDI AMRI, SE
NIP 19641231 198612 1 002

Dipindai dengan CamScanner